

# INDIKATOR EKONOMI MAKRO KECAMATAN KOTA DEPOK – 2019



kerjasama



Dinas Komunikasi dan Informatika  
Kota Depok



**IPB University**  
— Bogor Indonesia —

Departemen Statistika - FMIPA  
Institut Pertanian Bogor



# Indikator Ekonomi Makro Kecamatan Kota Depok 2019

# Indikator Ekonomi Makro Kecamatan Kota Depok 2019

Ukuran Buku / <i>Book Size</i>	: 28 Cm × 21.5 Cm
Jumlah halaman / <i>Total size</i>	: 40 halaman / 40 <i>page</i>
Naskah / <i>Manuscript</i>	: Fakultas Matematika dan IPA, IPB University
Gambar kulit dan Seting / <i>Cover design and Setting</i>	: Fakultas Matematika dan IPA, IPB University
Diterbitkan oleh / <i>Published by</i>	: Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Depok

Boleh mengutip dengan menyebut sumbernya  
*May be cited with the reference to the sources*

---

## **KATA SAMBUTAN**

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan mengucapkan puji syukur kepada Allah SWT, atas rahmat dan karunia-Nya, buku Indikator Ekonomi Makro Kecamatan di Kota Depok Tahun 2019 dapat diterbitkan. Buku Indikator Ekonomi Makro Kecamatan Tahun 2019 ini diharapkan dapat digunakan sebagai pedoman dalam menentukan arah dan kebijakan pembangunan di Kota Depok, khususnya untuk bahan perencanaan dan evaluasi pembangunan di kecamatan. Buku ini juga diharapkan dapat memenuhi kebutuhan berbagai pihak, baik masyarakat maupun institusi pemerintah dan swasta.

Kepada Departemen Statistika, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Institut Pertanian Bogor, yang sudah banyak membantu dalam penyusunan buku ini disampaikan penghargaan dan ucapan terimakasih, juga kepada semua pihak yang telah berperan dalam penerbitan Buku Indikator Ekonomi Makro Kecamatan Kota Depok 2019 disampaikan ucapan terimakasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

**Depok, Desember 2020**  
**Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika**  
**Kota Depok,**

**Dr. Ir. Sidik Mulyono, M.Eng**  
**NIP. 19670124 198602 1 001**

## **KATA PENGANTAR**

Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakaatuh.

Pembangunan ekonomi menjadi pusat perhatian dalam melihat kemajuan suatu wilayah karena dipandang berhubungan dengan kemampuan pemenuhan hajat hidup masyarakat secara keseluruhan. Untuk mencermati perkembangan pembangunan ekonomi di suatu daerah, dapat dilihat dari Produk Domestik Regional Bruto (PDRB).

Buku Indikator Ekonomi Makro Kecamatan Kota Depok 2019 ini dimaksudkan untuk dapat memberikan informasi mengenai kondisi perekonomian setiap kecamatan yang ada di Kota Depok, termasuk kondisi untuk setiap sektor lapangan usaha.

Kami berterima kasih kepada Pemerintah Kota Depok, khususnya Dinas Komunikasi dan Informatika yang memberikan kepercayaan kepada Departemen Statistika - FMIPA, Institut Pertanian Bogor, untuk bekerjasama menyusun buku ini. Ucapan terima kasih juga kami sampaikan kepada pihak-pihak lain, khususnya Badan Pusat Statistik yang menjadi sumber data utama.

Atas nama Departemen Statistika - FMIPA IPB, kami menghaturkan permohonan maaf apabila ada kekurangan dalam pelaksanaan kegiatan dan hasil yang diperoleh. Mudah-mudahan buku ini dapat memberikan kontribusi dalam perencanaan pembangunan secara umum di Kota Depok.

Wassalamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.

**Bogor, Desember 2020**  
**Ketua Departemen Statistika**  
**FMIPA - Institut Pertanian Bogor**

**Dr. Anang Kurnia**

## **DAFTAR ISI**

<b>KATA SAMBUTAN .....</b>	<b>i</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>ii</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>iii</b>
<b>DAFTAR TABEL.....</b>	<b>v</b>
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	<b>vi</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Maksud dan Tujuan .....	3
1.3. Kegiatan Ekonomi .....	4
1.4. Konsep dan Definisi .....	5
1.4.1. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB).....	5
1.4.2. PDRB Atas Dasar Harga Berlaku.....	6
1.4.3. PDRB Atas Dasar Harga Konstan .....	7
1.5. Konsep Pendapatan Regional .....	7
1.5.1. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Atas Dasar Harga Pasar ..	7
1.5.2. Produk Domestik Regional Netto Atas Dasar Harga Pasar .....	7
1.5.3. Produk Domestik Regional Netto Atas Dasar Harga Faktor .....	7
1.5.4. Pendapatan Regional .....	7
1.5.5. Pendapatan Perorangan dan Pendapatan yang Siap Dibelanjakan ....	8
<b>BAB II METODOLOGI.....</b>	<b>10</b>
2.1. Penghitungan PDRB Kecamatan Kota Depok Tahun 2019 .....	10
2.2. Cara Penyajian Nilai PDRB Kecamatan .....	12
<b>BAB III     ULASAN SINGKAT PDRB KECAMATAN KOTA DEPOK</b>	
<b>TAHUN 2019 .....</b>	<b>13</b>
3.1. Umum .....	13
3.2. Kecamatan Sawangan.....	18

3.3.	Kecamatan Bojongsari .....	19
3.4.	Kecamatan Pancoran Mas .....	20
3.5.	Kecamatan Cipayung .....	20
3.6.	Kecamatan Sukmajaya .....	21
3.7.	Kecamatan Cilodong .....	21
3.8.	Kecamatan Cimanggis .....	22
3.9.	Kecamatan Tapos .....	22
3.10.	Kecamatan Beji .....	23
3.11.	Kecamatan Limo .....	23
3.12.	Kecamatan Cinere .....	24
<b>BAB IV</b>	<b>PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO LAPANGAN</b>	
	<b>USAHA KOTA DEPOK DIRINCI MENURUT KECAMATAN</b>	
	<b>TAHUN 2019 .....</b>	<b>25</b>

## DAFTAR TABEL

Tabel 1.1. Neraca Produksi .....	5
Tabel 2.1. Produk Domestik Regional Bruto Lapangan Usaha Kota Depok Tahun 2019 Atas Dasar Harga Berlaku dan Atas Dasar Harga Konstan (Milyar Rupiah).....	10
Tabel 3.1. Informasi umum karakteristik kecamatan di Kota Depok .....	13
Tabel 3.2. PDRB Kecamatan Atas Dasar Harga Berlaku dan PDRB per Kapita per Kecamatan di Kota Depok Tahun 2019.....	15
Tabel 3.3. Perkembangan PDRB Kota Depok Atas Dasar Harga Berlaku pada tahun 2018 ke tahun 2019 .....	16
Tabel 4.1. Produk Domestik Regional Bruto Lapangan Usaha Kota Depok Atas Dasar Harga Berlaku Dirinci Menurut Kecamatan Tahun 2019 (Milyar Rp).....	25
Tabel 4.2. Produk Domestik Regional Bruto Lapangan Usaha Kota Depok Atas Dasar Harga Konstan 2010 Dirinci Menurut Kecamatan Tahun 2019 (Miliar Rp) .....	28
Tabel 4.3. Distribusi Produk Domestik Regional Bruto Lapangan Usaha Kota Depok Atas Dasar Harga Berlaku Dirinci Menurut Kecamatan Tahun 2019 (Persen) .....	31
Tabel 4.4. Distribusi Produk Domestik Regional Bruto Lapangan Usaha Kota Depok Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2010 Dirinci Menurut Kecamatan Tahun 2019 (Persen) .....	34
Tabel 4.5. <i>Sharing</i> Setiap Sub Sektor Ekonomi di Kecamatan dalam Pembentukan Produk Domestik Regional Bruto Lapangan Usaha Kota Depok Atas Dasar Harga Berlaku Tahun 2019 (Persen) .....	37
Tabel 4.6. <i>Sharing</i> Setiap Sub Sektor Ekonomi di Kecamatan dalam Pembentukan Produk Domestik Regional Bruto Lapangan Usaha Kota Depok Atas Dasar Harga Konstan 2010 Tahun 2019 (Persen).....	40

## **DAFTAR GAMBAR**

Gambar 1.1. Siklus Kegiatan Ekonomi .....	5
Gambar 1.2. Susunan Agregat Pendapatan Regional .....	9
Gambar 3.1. Peta Administrasi Kota Depok.....	14
Gambar 3.2. Biplot Andil Sektor Usaha kepada PDRB Kota Depok menurut Kecamatan.....	17
Gambar 3.3. Biplot Andil Kecamatan terhadap Total PDRB Kota Depok untuk Masing-masing Sektor .....	18

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang**

Salah satu keberhasilan pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah adalah pembangunan pada sektor ekonomi, sebuah sektor yang melibatkan seluruh komponen yang ada di wilayah yang bersangkutan. Pembangunan ekonomi melibatkan sektor pemerintah, swasta dan masyarakat umum di dalamnya. Siedman (2005) menyebutkan bahwa pembangunan ekonomi merupakan suatu proses membuat dan memanfaatkan sumberdaya fisik, sumber daya manusia, keuangan, dan modal-modal sosial untuk menimbulkan perbaikan dan pemerataan ekonomi dan kualitas kehidupan bagi masyarakat atau wilayah.

Pembangunan ekonomi menjadi pusat perhatian dalam melihat kemajuan suatu wilayah karena dipandang berhubungan dengan kemampuan pemenuhan hajat hidup masyarakat secara keseluruhan. Sebut saja misalnya penemuan fasilitas kesehatan dan pendidikan yang merupakan kebutuhan utama masyarakat umumnya sangat berhubungan dengan kemampuan ekonomi suatu wilayah. Ekonomi yang tumbuh dengan sangat baik umumnya juga mendorong terciptanya lapangan kerja dalam jumlah yang memadai bagi penduduknya dan dengan demikian akan menghasilkan wilayah dengan tingkat pengangguran yang kecil.

Meskipun bukan satu-satunya, indikator makro utama yang sering digunakan di berbagai perbincangan mengenai kondisi dan keberhasilan pembangunan ekonomi suatu wilayah adalah nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dan pertumbuhannya. Pengetahuan mengenai nilai PDRB dan pertumbuhannya dibandingkan keadaan pada waktu atau periode sebelumnya penting untuk mengevaluasi apakah strategi pembangunan ekonomi yang sedang dijalankan oleh suatu pemerintahan telah berjalan dengan efektif.

Pembangunan ekonomi daerah adalah suatu proses kerja antara pemerintah daerah dan masyarakatnya dalam mengelola sumber daya yang ada dan membentuk suatu pola kemitraan antara pemerintah daerah dengan sektor swasta untuk menciptakan suatu lapangan kerja baru dan merangsang perkembangan kegiatan

ekonomi (pertumbuhan ekonomi) dalam wilayah tersebut (Lincoln Arsyad, 1999; Blakely, 1989).

Perencanaan pembangunan ekonomi suatu daerah memerlukan bermacam-macam data statistik yang akan digunakan sebagai bahan analisis untuk menentukan dan mengarahkan sasaran pembangunan. Kebijakan pembangunan ekonomi yang diambil pada masa-masa yang lalu perlu dievaluasi hasil dan implikasinya pada masyarakat. Dengan demikian data statistik yang merupakan ukuran kuantitas sangat diperlukan untuk memberikan gambaran tentang keadaan masa lalu dan keadaan masa sekarang serta sasaran yang akan dicapai pada masa yang akan datang.

Pembangunan ekonomi merupakan suatu usaha peningkatan produktifitas melalui proses produksi dengan cara pemanfaatan sumberdaya potensial yang dimiliki oleh daerah baik sumber daya alam, sumber daya manusia maupun sumber daya ekonominya secara optimal guna meningkatkan tingkat kesejahteraan masyarakatnya. Dengan demikian pembangunan ekonomi daerah adalah proses dimana pemerintah daerah dan masyarakatnya mengelola sumber-sumber daya yang ada dan membentuk suatu pola kemitraan antara pemerintah daerah dan dengan sektor swasta untuk menciptakan suatu lapangan kerja baru dan merangsang perkembangan kegiatan ekonomi (pertumbuhan ekonomi) dalam wilayah tersebut (Lincoln Arsyad, 1999).

Untuk mencermati perkembangan pembangunan ekonomi di suatu daerah, dapat dilihat dari tingkat pertumbuhan ekonominya (*economic growth*). Tingkat pertumbuhan ekonomi atau kenaikan nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan salah satu indikator makro yang sering digunakan disamping indikator makro lainnya seperti tingkat penciptaan kesempatan kerja (*employment*) dan kestabilan harga (*price stability*).

Dengan demikian pada hakekatnya, pembangunan ekonomi adalah serangkaian usaha dan kebijakan yang bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat, memperluas lapangan kerja, pemeratakan distribusi pendapatan masyarakat, meningkatkan hubungan ekonomi regional dan melalui pergeseran kegiatan ekonomi dari sektor primer ke sektor sekunder dan tersier. Dengan perkataan lain arah dari pembangunan ekonomi adalah mengusahakan agar

pendapatan masyarakat naik, disertai dengan tingkat pemerataan yang sebaik mungkin.

## **1.2. Maksud dan Tujuan**

Perencanaan pembangunan ekonomi suatu daerah memerlukan bermacam-macam data indikator ekonomi yang dapat dijadikan bahan untuk evaluasi pembangunan ekonomi yang telah tercapai dan perencanaan dimasa yang akan datang.

Salah satu data statistik indikator ekonomi yang sangat diperlukan untuk evaluasi dan perencanaan ekonomi makro pada level kecamatan adalah Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kecamatan yang disajikan secara series.

Pembangunan ekonomi yang telah dilaksanakan selama ini telah menyentuh seluruh wilayah Indonesia. Oleh karena itu evaluasi hasil pembangunan di daerah memerlukan gambaran keadaan ekonomi. Untuk itu data statistik indikator ekonomi yang berupa PDRB Kecamatan Kota Depok sangat diperlukan untuk mengevaluasi hasil-hasil pembangunan selama ini serta kaitannya dengan menentukan sasaran-sasaran pembangunan pada masa yang akan datang sampai level kecamatan.

Secara agregat, untuk masing-masing Kabupaten/Kota di Indonesia, BPS telah menyediakan informasi mengenai besaran PDRB. Namun angkanya tidak tersedia hingga level kecamatan. Karenanya, Pemerintah Kota Depok perlu melakukan perhitungan PDRB per kecamatan untuk dapat memantau lebih rinci perkembangan pembangunan ekonomi di wilayah ini.

Pembangunan ekonomi pada hakekatnya adalah serangkaian usaha dan kebijaksanaan yang bertujuan untuk meningkatkan pendapatan masyarakat, memperluas lapangan pekerjaan, pemerataan pendapatan masyarakat, mengusahakan penggeseran kegiatan ekonomi dari sektor Primer ke sektor Sekunder dan Tersier serta meningkatkan ekspor ke luar negeri.

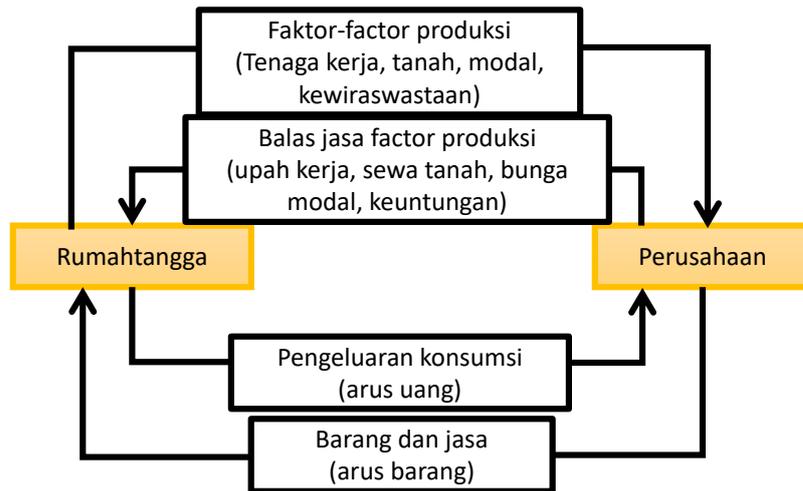
Dengan tersedianya data statistik Indikator Ekonomi Kecamatan berupa PDRB Kecamatan secara berkala dapat diketahui antara lain:

- a) Kemampuan sumber daya ekonomi masing-masing kecamatan yang diperlihatkan oleh nilai nominal PDRB atas dasar harga berlaku.

- b) Tingkat Pertumbuhan Ekonomi masing-masing kecamatan yang diperoleh dari Laju Pertumbuhan PDRB atas dasar harga konstan.
- c) Tingkat kemakmuran penduduk di suatu kecamatan dengan membandingkan PDRB perkapita dengan kecamatan lain.
- d) Tingkat inflasi masing-masing kecamatan yang merupakan persentase perubahan Indeks Harga Implisit dua tahun yang berurutan. Peningkatan pendapatan akan tidak berarti jika tingkat inflasi tinggi. Dengan kata lain peningkatan pendapatan tidak berarti bila diiringi dengan penurunan daya beli uang (Rupiah) terhadap barang dan jasa (terbatasnya persediaan barang dan jasa).
- e) Gambaran struktur perekonomian masing-masing kecamatan yang merupakan kontribusi masing-masing sektor kegiatan ekonomi terhadap pembentukan PDRB.

### **1.3. Kegiatan Ekonomi**

Siklus kegiatan ekonomi sebagai prinsip dasar ekonomi makro merupakan interaksi antara produsen dan konsumen melalui berbagai transaksi yang terjadi, baik mengenai arus barang dan jasa maupun faktor-faktor produksi yang beroperasi dalam kegiatan ekonomi tersebut. Kelompok produsen menggunakan faktor produksi yang dimiliki oleh konsumen untuk menghasilkan barang dan jasa. Faktor produksi yang dimiliki oleh konsumen adalah: Tenaga kerja, Tanah, Modal dan Kewiraswastaan. Balas jasa faktor produksi adalah: Upah/gaji, Sewa tanah, Bunga modal dan Keuntungan. Sewa tanah, bunga modal dan keuntungan untuk selanjutnya dikatakan Surplus Usaha (dalam prakteknya sulit dipisahkan). Jumlah dari balas jasa atas keempat faktor produksi tersebut dikatakan nilai tambah (value added). Siklus kegiatan ekonomi ini secara sederhana tampak pada Gambar 1.1.



Gambar 1.1. Siklus Kegiatan Ekonomi

Secara umum siklus kegiatan ekonomi dapat dijelaskan sebagai Neraca Produksi suatu usaha sebagaimana Tabel 1.1.

Tabel 1.1. Neraca Produksi

Pendapatan / Penerimaan	Pengeluaran / Pembayaran
1. Output antara	1. Input antara
2. Konsumsi akhir	2. Impor barang dan jasa
3. Investasi (Pembentukan barang modal dan perubahan stok)	3. Upah/gaji
4. Ekspor barang dan jasa	4. Surplus usaha *)
	5. Penyusutan
	6. Pajak tak langsung neto (**)

\*) (Sewa tanah) + (Bunga modal) + Keuntungan

\*\*\*) (Pajak tak langsung) – Subsidi

## 1.4. Konsep dan Definisi

Beberapa penjelasan mengenai pengertian PDRB, PDRB atas dasar harga berlaku, PDRB atas dasar harga konstan, pendapatan regional, pendapatan perkapita dan lainnya diuraikan di bawah ini.

### 1.4.1. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

PDRB dapat diartikan ke dalam 3 pengertian yaitu:

#### a) Pendekatan Produksi (*Production approach*)

PDRB adalah jumlah nilai produk barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh berbagai unit produksi dalam suatu wilayah/region pada suatu jangka waktu tertentu, biasanya setahun. Formulasi penghitungan nilai tambah bruto pendekatan produksi adalah:

$$(\text{Nilai Tambah Bruto}) = (\text{Nilai Produksi}) - (\text{Biaya Antara})$$

b) Pendekatan Pendapatan (*Income approach*)

PDRB adalah jumlah balas jasa yang diterima oleh faktor-faktor produksi yang ikut didalam proses produksi di suatu wilayah/region pada jangka waktu tertentu (setahun). Balas jasa faktor produksi tersebut adalah upah dan gaji, sewa tanah, bunga modal, dan keuntungan. Dalam pengertian PDRB termasuk pula penyusutan barang modal dan pajak tidak langsung netto (Pajak tak langsung – subsidi). Jumlah semua komponen pendapatan per sektor disebut sebagai nilai tambah bruto sektoral. PDRB merupakan jumlah dari nilai tambah bruto seluruh sektor atau lapangan usaha.

$$(\text{Nilai Tambah Bruto}) = (\text{Upah atau Gaji}) + (\text{Surplus Usaha}) + (\text{Penyusutan}) + (\text{Pajak tak Langsung Neto})$$

c) Pendekatan Pengeluaran (*Expenditure approach*)

PDRB adalah jumlah semua pengeluaran untuk konsumsi rumahtangga dan lembaga swasta yang tidak mencari untung (lembaga nirlaba), konsumsi pemerintah, pembentukan modal tetap domestik bruto, perubahan stok, ekspor neto di suatu wilayah/region. Ekspor neto adalah ekspor dikurangi import.

$$(\text{Nilai Tambah Bruto}) = (\text{Konsumsi Akhir (Rumahtangga, Pemerintah dan Lembaga Nirlaba)}) + (\text{Pembentukan Modal Tetap Bruto}) + (\text{Perubahan Stok}) + (\text{Ekspor Neto})$$

#### 1.4.2. PDRB Atas Dasar Harga Berlaku

PDRB yang dinilai berdasarkan harga pada tahun berjalan, baik pada saat menilai produksi, biaya antara maupun komponen nilai tambah.

### **1.4.3. PDRB Atas Dasar Harga Konstan**

PDRB yang dinilai berdasarkan harga pada tahun tertentu atau tahun dasar, baik pada saat menilai produksi, biaya antara maupun komponen nilai tambah.

## **1.5. Konsep Pendapatan Regional**

### **1.5.1. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Atas Dasar Harga Pasar**

Angka Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Pasar diperoleh dengan menjumlahkan Nilai Tambah Bruto (*Gross Value Added*) yang ada dari seluruh sektor perekonomian di suatu wilayah.

### **1.5.2. Produk Domestik Regional Netto Atas Dasar Harga Pasar**

Produk Domestik Regional Netto (PDRN) Atas Dasar Harga Pasar merupakan hasil pengurangan Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Pasar dengan penyusutan.

### **1.5.3. Produk Domestik Regional Netto Atas Dasar Harga Faktor**

Jika PDRN Atas Dasar Harga Pasar dikurangi Pajak Tidak Langsung Netto maka diperoleh PDRN Atas Dasar Biaya Faktor. Pajak tidak langsung ini meliputi pajak pertambahan nilai, bea ekspor dan impor, cukai dan lain-lain pajak, kecuali pajak penghasilan dan pajak perseroan. Pajak tidak langsung dari unit-unit produksi dibebankan pada biaya produksi atau pada pembeli sehingga mengakibatkan kenaikan harga barang. Subsidi yang diberikan pemerintah kepada unit-unit produksi dapat mengakibatkan penurunan harga. Pajak tidak langsung dikurangi subsidi diperoleh pajak tidak langsung.

### **1.5.4. Pendapatan Regional**

Dari beberapa konsep yang diterangkan di atas, ternyata PDRN atas dasar biaya faktor merupakan jumlah balas jasa faktor-faktor produksi yang turut dalam proses produksi di region tersebut. PDRN atas dasar biaya faktor merupakan jumlah dari pendapatan yang berupa upah dan gaji, bunga, sewa tanah dan keuntungan yang ada atau merupakan pendapatan yang berasal dari region tersebut. Pendapatan yang dihasilkan itu tidak seluruhnya menjadi pendapatan penduduk region tersebut

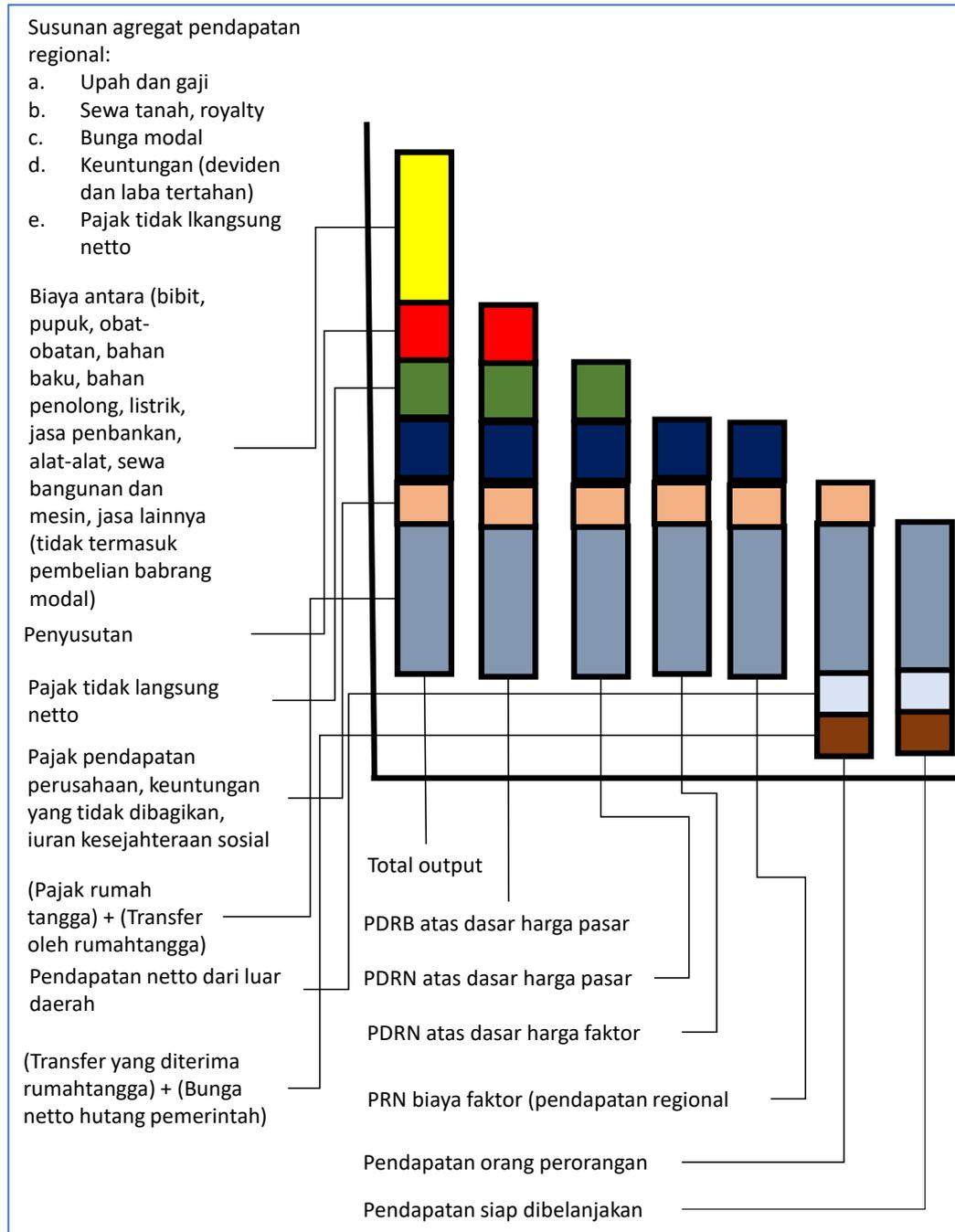
karena ada sebagian pendapatan yang diterima oleh penduduk region lain. Jika pendapatan regional dibagi jumlah penduduk yang tinggal di region dimaksud maka menghasilkan suatu pendapatan perkapita.

#### **1.5.5. Pendapatan Perorangan dan Pendapatan yang Siap Dibelanjakan**

Berdasarkan uraian di atas, konsep-konsep yang dipakai dalam pendapatan regional dapat diurutkan sebagai berikut:

- a) PDRB Atas Dasar Harga Pasar; Minus: Penyusutan, akan sama dengan
- b) PDRN Atas Dasar Harga Pasar; Minus: Pajak Tidak Langsung Netto, akan sama dengan
- c) PDRN Atas Dasar Biaya Faktor; Plus: Pendapatan Netto yang mengalir dari luar daerah atau luar negeri, akan sama dengan
- d) Pendapatan Regional; Minus: Pajak Pendapatan Perusahaan, Keuntungan Yang Tidak Dibagikan, Iuran Kesejahteraan Sosial; Plus: Transfer Yang Diterima Rumahtangga, Bunga Netto atas Hutang Pemerintah, akan sama dengan
- e) Pendapatan Perorang (*Personal Income*); Minus: Pajak Rumahtangga, Transfer yang Dibayarkan oleh Rumahtangga, akan sama dengan
- f) Pendapatan yang siap dibelanjakan (*Disposable Income*).

Diagram susunan agregat pendapatan regional dapat dilihat pada Gambar 1.2.



Gambar 1.2. Susunan Agregat Pendapatan Regional

## BAB II

### METODOLOGI

#### 2.1. Penghitungan PDRB Kecamatan Kota Depok Tahun 2019

Pada bagian ini akan dipaparkan penjelasan mengenai metodologi yang diimplementasikan untuk memperoleh Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kecamatan untuk setiap kecamatan yang ada di Kota Depok. PDRB Kecamatan merupakan jumlah nilai produk barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit produksi di dalam suatu kecamatan pada suatu periode tertentu, biasanya satu tahun, tanpa memperhitungkan kepemilikan. Nilai PDRB Kecamatan tahun 2019 pada buku ini didapatkan dengan cara mendistribusikan nilai PDRB Kota Depok tahun 2019 yang telah dipublikasikan oleh Badan Pusat Statistik. Besaran PDRB Kota Depok 2019 menurut klasifikasi lapangan usaha Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) dan Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) dalam satuan Milyar Rupiah disajikan pada Tabel 2.1.

Tabel 2.1. Produk Domestik Regional Bruto Lapangan Usaha Kota Depok Tahun 2019 Atas Dasar Harga Berlaku dan Atas Dasar Harga Konstan (Milyar Rupiah)

No	Lapangan Usaha		PDRB ADHB**	PDRB ADHK**
[1]	[2]		[3]	[4]
1	A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	952,27	543,05
2	B	Pertambangan dan Penggalian	-	-
3	C	Industri Pengolahan	20.377,71	14.293,45
4	D	Pengadaan Listrik dan Gas	198,80	128,84
5	E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	54,13	36,02
6	F	Konstruksi	14.800,78	10.591,23
7	G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	15.735,86	10.684,99
8	H	Transportasi dan Pergudangan	3.039,28	1.709,13
9	I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	2.906,66	1.714,51
10	J	Informasi dan Komunikasi	1.271,82	1.327,69
11	K	Jasa Keuangan dan Asuransi	2.825,89	1.868,75
12	L	Real Estat	1.150,29	877,44
13	M,N	Jasa Perusahaan	144,12	105,09
14	O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	1.921,69	1.182,11
15	P	Jasa Pendidikan	2.195,20	1.390,82
16	Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	783,40	564,49

No	Lapangan Usaha		PDRB ADHB**	PDRB ADHK**
[1]	[2]		[3]	[4]
17	R,S,T,U	Jasa lainnya	2.684,09	2.059,01
	Total	Produk Domestik Regional Bruto	71.041,99	49.076,63

\*\* Angka sangat sementara. Sumber: BPS (2020)

Nilai total PDRB Kota Depok yang disajikan pada Tabel 2.1 tersebut selanjutnya akan menjadi dasar pengalokasian ke masing-masing kecamatan yang ada di Kota Depok.

Andaikan  $P_j$  merupakan nilai PDRB Kota Depok tahun 2019 untuk klasifikasi ke- $j$  dimana  $j = 1, 2, \dots, 17$  dengan indeks 1 untuk Lapangan Usaha A- Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan, indeks 2 untuk Lapangan Usaha B- Pertambangan dan Penggalian, dan seterusnya hingga indeks 17 untuk Lapangan Usaha RSTU- Jasa Lainnya. Besarnya PDRB Kecamatan untuk kecamatan ke- $i$  dinotasikan  $P_{ij}$  diperoleh dengan formula

$$P_{ij} = P_j \times w_{ij}$$

dengan  $w_{ij}$  adalah bobot untuk kecamatan ke- $i$  pada sektor ke- $j$ , yang memenuhi kendala  $\sum_i^{11} w_{ij} = 1$  untuk setiap sektor ke- $j$ . Sebelas kecamatan yang ada di Kota Depok adalah Kecamatan Sawangan, Kecamatan Bojongsari, Kecamatan Pancoran Mas, Kecamatan Cipayung, Kecamatan Sukmajaya, Kecamatan Cilodong, Kecamatan Cimanggis, Kecamatan Tapos, Kecamatan Beji, Kecamatan Limo, dan Kecamatan Cinere.

Bobot setiap sektor lapangan usaha untuk masing-masing kecamatan adalah nilai  $w_{ij}$  dan diperoleh sebagai kombinasi atau rata-rata terboboti dari nilai bobot yang diperoleh dari tiga sumber yaitu:

- $w_{ij-1}$ : Share kontribusi kecamatan untuk setiap sektor pada tahun 2018 (sumber: Buku Indikator Ekonomi Kecamatan Kota Depok 2018)
- $w_{ij-2}$ : Proporsi banyaknya tenaga kerja dari setiap kecamatan untuk masing-masing sektor lapangan usaha berdasarkan Susenas 2019 yang diolah oleh tim kajian
- $w_{ij-3}$ : share berdasarkan indikator spesifik tiap sektor seperti banyaknya industri, banyaknya fasilitas, dan lain sebagainya yang diolah oleh tim kajian dari berbagai sumber.

Nilai bobot  $w_{ij}$  diperoleh menggunakan formula

$$w_{ij} = 0.90 w_{ij-1} + 0.07 w_{ij-1} + 0.03 w_{ij-1}$$

## **2.2. Cara Penyajian Nilai PDRB Kecamatan**

Penyajian PDRB Kecamatan dibedakan dalam dua bentuk:

- a. Penyajian PDRB Kecamatan Atas Dasar Harga Berlaku; untuk melihat besarnya PDRB Kecamatan berdasarkan harga pada tahun tersebut.
- b. Penyajian PDRB Kecamatan Atas Dasar Harga Konstan (2010); untuk melihat perkembangan nilai PDRB Kecamatan dari tahun ke tahun semata-mata karena perkembangan riil dan bukan disebabkan kenaikan harga.

Untuk dapat menggambarkan perkembangan kegiatan ekonomi di setiap kategori, maka penyajian PDRB Kecamatan dirinci menurut 17 kategori lapangan usaha yaitu:

- a) Pertanian, Kehutanan dan Perikanan (A)
- b) Pertambangan dan Pengalihan (B)
- c) Industri Pengolahan (C)
- d) Pengadaan Listrik dan Gas (D)
- e) Pengadaan Air (E)
- f) Konstruksi (F)
- g) Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi dan Perawatan Mobil dan Sepeda Motor (G)
- h) Transportasi dan Pergudangan (H)
- i) Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum (I)
- j) Informasi dan Komunikasi (J)
- k) Jasa Keuangan (K)
- l) Real Estat (L)
- m) Jasa Perusahaan (M, N)
- n) Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib (O)
- o) Jasa Pendidikan (P)
- p) Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial (Q)
- q) Jasa Lainnya (R, S, T, U)

## BAB III

### ULASAN SINGKAT PDRB

### KECAMATAN KOTA DEPOK TAHUN 2019

#### 3.1. Umum

Kota Depok adalah kota satelit di selatan ibukota negara Indonesia, yaitu DKI Jakarta yang Secara astronomis, terletak antara 6° 19' hingga 6° 28' Lintang Selatan dan antara 106°43' hingga 106° 55' Bujur Timur. Wilayah administrasi Kota Depok terdiri atas 11 Kecamatan, yaitu (1) Sawangan, (2) Bojongsari, (3) Pancoran Mas, (4) Cipayung, (5) Sukmajaya, (6) Cilodong, (7) Cimanggis, (8) Tapos, (9) Beji, (10) Limo, dan (11) Cinere. Lanskap Kota Depok umumnya berupa daerah dataran rendah dengan perbukitan bergelombang lemah, yang memiliki ketinggian antara 77–140 meter di atas permukaan laut dan kemiringan lerengnya tidak lebih dari 15%. Luas wilayah Kota Depok sekitar 200,30 km<sup>2</sup>.

Tabel 3.1 menyajikan beberapa karakteristik geografis masing-masing kecamatan yang ada di wilayah Kota Depok. Kecamatan Tapos dan Kecamatan Sawangan merupakan dua wilayah yang terluas dengan masing-masing luas wilayah 33,26 km<sup>2</sup> dan 26,19 km<sup>2</sup>. Kecamatan Tapos sekaligus sebagai kecamatan yang jarak ke ibukota Kota Depok yang paling jauh. Sedangkan Kecamatan Cinere, Kecamatan Cipayung dan Kecamatan Limo adalah yang paling kecil dengan luas tidak lebih dari 12 km<sup>2</sup>.

Tabel 3.1. Informasi umum karakteristik kecamatan di Kota Depok

Kode Kecamatan	Kecamatan	Luas Wilayah (km <sup>2</sup> )	Rata-rata Ketinggian (m dpal)	Jarak ke Ibukota Kota Depok (km)
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]
010	Sawangan	26,19	106	8,6
011	Bojongsari	19,30	60	11,8
020	Pancoran Mas	18,03	104	1,3
021	Cipayung	11,45	150	5,7
030	Sukmajaya	17,35	98	3,7
031	Cilodong	16,19	111	7,3
040	Cimanggis	21,58	106	8,4
041	Tapos	33,26	90	15,2
050	Beji	14,56	91	3,4
060	Limo	11,84	96	8,4
061	Cinere	10,55	77	10,6

Peta Kecamatan-kecamatan Kota Depok disajikan pada Gambar 3.1. Kecamatan-kecamatan Cinere, Beji, dan Cimanggis berbatasan langsung dengan DKI Jakarta di sebelah Utara. Adapun Kecamatan Bojongsari, Sawangan, Cipayung, Cilodong, dan Tapos berbatasan dengan Kabupaten dan Kota Bogor di Selatan. Kecamatan-kecamatan Cipayung, Pancoran Mas, Beji, dan Cimanggis adalah empat Kecamatan yang dilalui jalan utama Bogor – Jakarta. Posisi relatif wilayah-wilayah dari ibukota sedikit banyak berpengaruh kepada macam kegiatan ekonomi.



Gambar 3.1. Peta Administrasi Kota Depok

Kondisi perekonomian Kecamatan di Kota Depok Tahun 2019 secara umum tergambar pada Tabel 3.2 dimana dapat dilihat nilai total PDRB Atas Dasar Harga Berlaku dan nilai PRDB per kapitanya. Sedangkan rincian per kecamatan dan per sektor lapangan usaha disajikan pada Bagian 4. Demikian pula gambaran andil (*share*) masing-masing kecamatan per sektor usaha dan kepada PDRB Kota Depok, dan andil masing-masing sektor kepada PDRB kecamatan, disajikan pada tabel terpisah pada Bagian 4.

Empat kecamatan di Kota Depok yang mempunyai andil terbesar terhadap pembentukan PDRB Kota Depok Tahun 2019 atas dasar harga berlaku (Tabel 3.2)

adalah Kecamatan Cimanggis (25,70%), Kecamatan Cilodong (18,54%), Kecamatan Tapos (11,02%), serta Kecamatan Beji (10,09%). Tujuh kecamatan lainnya masing-masing mempunyai andil di bawah 9%, yaitu Pancoran Mas (8,25%), Sukmajaya (7,19%), Sawangan (5,64%), Cinere (3,96%), Bojongsari (3,58%), Limo (3,20%), dan Cipayung (2,84%). Pada Tabel 3.2 disajikan pula jumlah penduduk (jiwa) dan PDRB per kapita masing-masing Kecamatan di Kota Depok. Secara umum tampaknya ada korelasi linear antara PDRB dengan PDRB per kapita ( $r = 0,86$ ), yaitu tingginya PDRB berbanding lurus dengan tingginya PDRB per kapita. Korelasi antara PDRB dengan jumlah penduduk sebesar 0,57.

Tabel 3.2. PDRB Kecamatan Atas Dasar Harga Berlaku dan PDRB per Kapita per Kecamatan di Kota Depok Tahun 2019

Kecamatan	PDRB ADHB (milyar rupiah)	Persentase PDRB ADHB	Jumlah Penduduk (jiwa)	PDRB per Kapita (rupiah)
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]
010 Sawangan	4.007,94	5,64%	171.068	23.428.950
011 Bojongsari	2.539,99	3,58%	138.070	18.396.366
020 Pancoran Mas	5.859,20	8,25%	291.429	20.105.052
021 Cipayung	2.014,84	2,84%	177.085	11.377.817
030 Sukmajaya	5.108,02	7,19%	321.600	15.883.155
031 Cilodong	13.172,44	18,54%	173.066	76.112.251
040 Cimanggis	18.259,78	25,70%	334.989	54.508.601
041 Tapos	7.828,95	11,02%	299.322	26.155.624
050 Beji	7.168,50	10,09%	229.671	31.212.054
060 Limo	2.270,14	3,20%	121.760	18.644.398
061 Cinere	2.812,18	3,96%	148.766	18.903.361
Total	71.041,99	100,00%	2.406.826	29.516.878

Sementara itu, Tabel 3.3 memberikan informasi mengenai perubahan atau perkembangan PDRB Kota Depok Tahun 2019 dibandingkan Tahun 2018 secara total dan untuk masing-masing sector lapangan usaha. Secara umum, pada tahun 2019, PRDB Kota Depok mengalami peningkatan sebesar 6,74%. Beberapa sektor yang meningkat pesat hingga lebih dari 10% antara lain adalah F-Konstruksi (9,99%), I-Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum (9,20%) , L-Real Estat (10,84%), Q-Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial (9,77%), dan R,S,T,U-Jasa lainnya (9,82%).

Tabel 3.3. Perkembangan PDRB Kota Depok Atas Dasar Harga Berlaku pada tahun 2018 ke tahun 2019

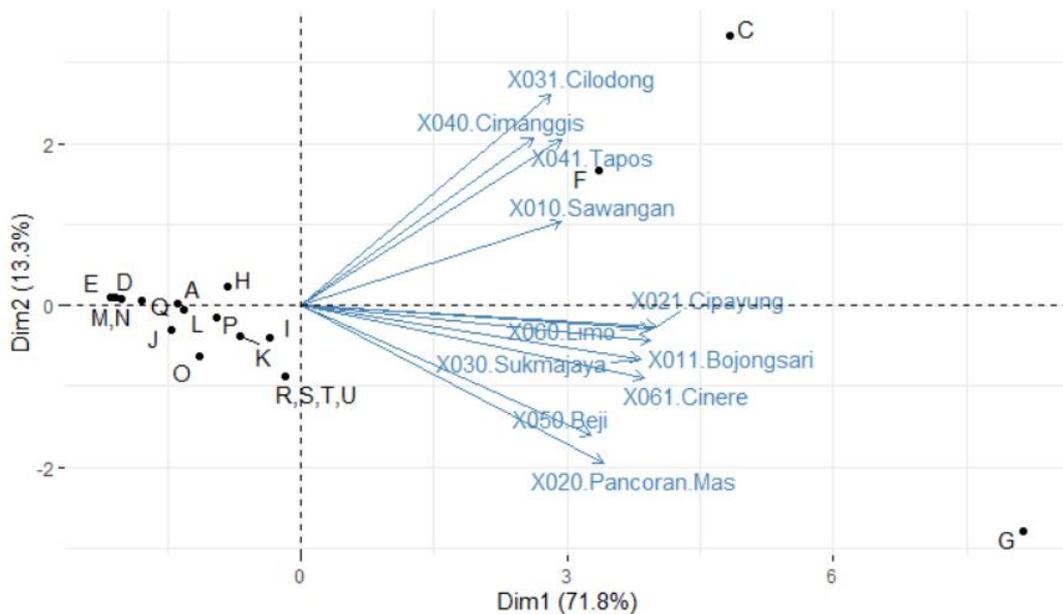
No	Lapangan Usaha	2018*	2019**	Pertumbuhan 2018 ke 2019
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	524,35	543,05	3,57%
B	Pertambangan dan Penggalian			
C	Industri Pengolahan	13.827,72	14.293,45	3,37%
D	Pengadaan Listrik dan Gas	123,57	128,84	4,26%
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	34,9	36,02	3,21%
F	Konstruksi	9.628,96	10.591,23	9,99%
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	9.873,46	10.684,99	8,22%
H	Transportasi dan Pergudangan	1.615,24	1.709,13	5,81%
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	1.570,03	1.714,51	9,20%
J	Informasi dan Komunikasi	1.218,28	1.327,69	8,98%
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	1.839,48	1.868,75	1,59%
L	Real Estat	791,61	877,44	10,84%
M,N	Jasa Perusahaan	101,19	105,09	3,85%
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	1131,12	1182,11	4,51%
P	Jasa Pendidikan	1309,84	1390,82	6,18%
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	514,24	564,49	9,77%
R,S,T,U	Jasa lainnya	1874,9	2059,01	9,82%
	Total Produk Domestik Regional Bruto	45.978,89	49.076,63	6,74%

Kontribusi dari masing-masing kecamatan terhadap pembentukan PDRB Kota Depok Tahun 2019 atas dasar harga konstan tahun 2010 juga memperlihatkan pola yang hampir sama dengan kontribusi PDRB atas dasar harga berlaku. Hal ini memperlihatkan bahwa semua kecamatan di Kota Depok tidak mengalami perbedaan harga berlaku yang mencolok. PDRB atas dasar harga konstan secara riil menggambarkan produksi dari setiap sektor ekonomi tanpa dipengaruhi oleh faktor harga.

Andil sektor usaha per kecamatan dan Kota Depok disajikan pada Tabel 4.3. Ada tiga kategori lapangan usaha yang berperan dominan pada pembentukan PDRB di masing-masing kecamatan, yaitu C - industri pengolahan (28,68%), G - perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor (22,15%), dan F - konstruksi (20,83%). Kecuali Cilodong, Cimanggis, Tapos, dan Sawangan, di seluruh kecamatan di Kota Depok, perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor menjadi sektor usaha yang paling tinggi andilnya kepada PDRB

Kota Depok. Di Kecamatan Cilodong dan Tapos, sektor yang paling tinggi dalam hal ini adalah sektor industri pengolahan. Adapun kecamatan dengan konstruksi sebagai sektor dominan terdapat di Kecamatan Sawangan dan Cimanggis.

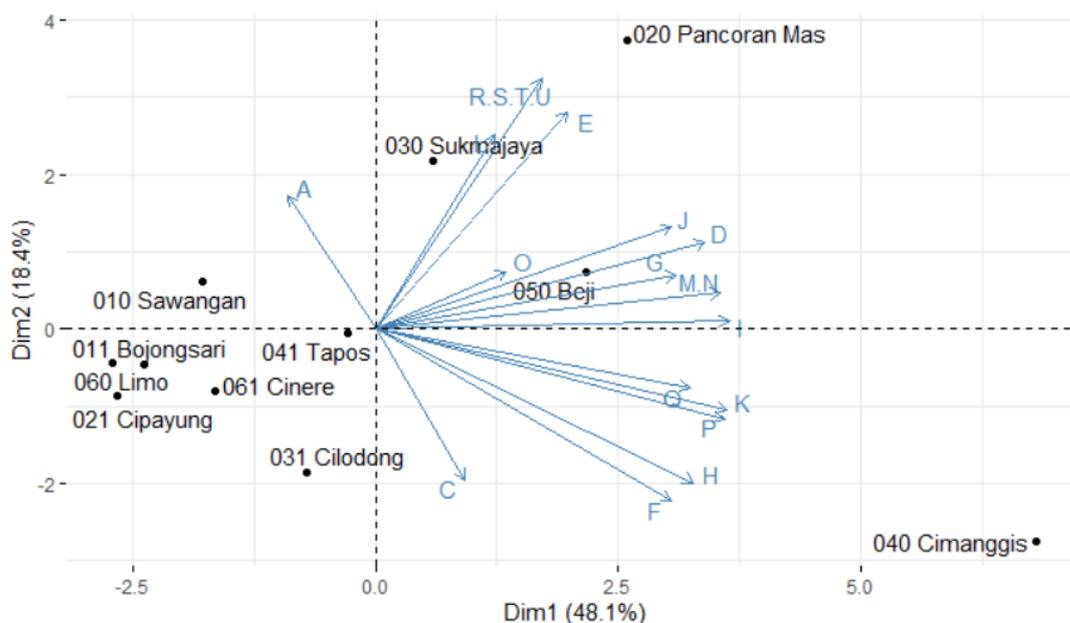
Grafik Biplot Gambar 3.2 merupakan visualisasi andil sektor usaha pada pembentukan PDRB Kota Depok. Sektor-sektor dengan kontribusi yang dominan digambarkan sebagai sektor yang diposisikan pada bagian kanan grafik, yaitu C- industri pengolahan, G- perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor, dan F- konstruksi. Sedangkan sektor lainnya terletak di bagian kiri yang mengindikasikan bahwa sektor-sektor tersebut kontribusinya lebih rendah, terutama sektor E- Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang, M,N- Jasa Perusahaan, dan D- Pengadaan Listrik dan Gas.



Gambar 3.2. Biplot Andil Sektor Usaha kepada PDRB Kota Depok menurut Kecamatan

Andil kecamatan terhadap total PDRB Kota Depok untuk masing-masing sektor disajikan pada Tabel 4.5. Pada sektor A - Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan, beberapa kecamatan yang kontribusinya besar adalah Kecamatan Sawangan (17,99%), Kecamatan Bojongsari (14,85%), Kecamatan Tapos (13,47%), dan Kecamatan Pancoran Mas (12,76%). Sedangkan pada sektor C - Industri Pengolahan, didominasi oleh Kecamatan Cilodong (39,64%), Kecamatan Tapos (21,00%), dan Kecamatan Cimanggis (18,10%). Gambar 3.3 menyajikan Andil Kecamatan terhadap Total PDRB Kota Depok untuk Masing-masing Sektor

dalam bentuk Biplot. Pada gambar tampak sektor apa saja yang didominasi oleh kecamatan tertentu, misalnya Kecamatan Pancoran Mas dan Kecamatan Sukmajaya ditunjuk oleh arah vector sektor E, L dan RSTU. Hal ini berarti bahwa dua kecamatan ini sama-sama memiliki kontribusi yang besar pada ketiga sektor tersebut. Tampak pula secara jelas bahwa Kecamatan Cimanggis searah dengan vektor dari banyak sektor yang mengindikasikan bahwa Kecamatan Cimanggis merupakan kecamatan dengan andil yang besar pada berbagai sektor, terutama sektor F - Konstruksi, H - Transportasi dan Pergudangan, K - Jasa Keuangan dan Asuransi, P - Jasa Pendidikan, dan Q - Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial.



Gambar 3.3. Biplot Andil Kecamatan terhadap Total PDRB Kota Depok untuk Masing-masing Sektor

### 3.2. Kecamatan Sawangan

Kecamatan Sawangan memiliki kontribusi yang signifikan pembentukan PDRB pada beberapa sektor lapangan usaha. Sektor tersebut adalah sektor: (1) Real Estate, (2) Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan, dan (3) sektor Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial. Kontribusi Kecamatan Sawangan pada masing masing sektor lapangan usaha tersebut adalah 18,92%, 17,99%, dan 15,26%. Ketiga sektor di Kecamatan Sawangan ini merupakan sektor yang paling tinggi andilnya dibandingkan sepuluh kecamatan lainnya. Di sektor pertanian, produksi padi dari sawah Kecamatan Sawangan menjadi yang tertinggi di Kota Depok. Selain itu, juga

terdapat komoditas lain yang memiliki produksi tinggi seperti terong, mentimun, dan kangkung. Hal tersebut didukung oleh luasnya lahan yang dimanfaatkan sebagai lahan pertanian. Adapun sektor Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial merupakan sektor peringkat kedua paling tinggi setelah Kecamatan Pancoran Mas yang andilnya sebesar 16,98%.

Sementara itu apabila ditinjau di dalam kecamatan, sektor Konstruksi dan sektor Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor merupakan dua sektor usaha yang paling menonjol di kecamatan ini, dengan andil masing-masing sebesar 41,44% dan 20,26% terhadap PDRB Kecamatan Sawangan.

Kecamatan Sawangan merupakan Kecamatan di bagian selatan Kota Depok, berbatasan dengan Kabupaten Bogor. Kawasan ini cocok untuk kawasan pemukiman dengan iklim yang lebih sejuk sehingga di kecamatan ini banyak berkembang kawasan real estat. Di kecamatan ini juga cukup menonjol kegiatan pertanian, terutama pertanian perkebunan buah-buahan dan pertanian lahan kering. Meskipun demikian, kecamatan ini menampilkan karakter kecamatan perkotaan dengan sektor ekonomi yang menonjol adalah sektor Konstruksi dan sektor Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor.

### **3.3. Kecamatan Bojongsari**

Ditinjau dari andilnya terhadap pembentukan PDRB Kota Depok, tidak ada sektor usaha yang andilnya menonjol dari Kecamatan Bojongsari kecuali pada sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan merupakan sektor usaha yang paling tinggi andilnya dalam hal ini tetapi andilnya tidak melampaui 15%, yaitu sebesar 14,85%. Sektor usaha lainnya memiliki andil tidak lebih dari 10% (0,55% - 6,31%) pada PDRB di setiap lapangan usaha Kota Depok.

Adapun sektor usaha yang menonjol kontribusinya pada PDRB Kecamatan Bojongsari adalah Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor (39,08%) dan Industri Pengolahan (22,72%).

Kecamatan Bojongsari yang berbatasan dengan Kecamatan Sawangan merupakan wilayah dengan sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan yang tinggi sebagaimana kecamatan tetangganya tersebut dengan letak yang lebih jauh

mendekati wilayah Kabupaten Bogor. Sektor Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor juga tampak sebagai sektor ekonomi menonjol di Kecamatan Bojongsari, sebagaimana di Kecamatan Sawangan. Tetapi tidak seperti Kecamatan Sawangan, sektor Industri Pengolahan cukup menonjol di Kecamatan Bojongsari. Perkembangan sektor industri didukung oleh adanya sentra kuliner yang terpusat di Kecamatan Bojongsari. Sentra kuliner tersebut diresmikan oleh Dinas Perdagangan dan Perindustrian (Disdagin) Kota Depok pada tahun 2018.

### **3.4. Kecamatan Pancoran Mas**

Empat sektor usaha di Kecamatan Pancoran Mas yang besar andilnya kepada PDRB Kota Depok per sektor lapangan usaha adalah Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang (40,73%), Informasi dan Komunikasi (39,87%), Jasa Lainnya (27,96%) dan Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial (16,98%). Kecamatan Pancoran Mas menunjukkan karakter perkotaan yang tinggi, dimana sektor jasa menunjukkan aktifitas yang tinggi. Kecamatan Pancoran Mas terletak di tengah Kota Depok dan termasuk kecamatan yang dilalui jalan utama Bogor – Jakarta.

Sementara itu, sektor usaha yang menonjol sumbangannya pada PDRB Kecamatan Pancoran Mas adalah Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor (34,69%). Sektor Jasa Lainnya merupakan sektor yang cukup menonjol dengan kontribusinya pada PDRB kecamatan sebesar 12,81%. Andil sektor lainnya tidak lebih dari 10%, berkisar antara 0,38% dan 8,65%.

### **3.5. Kecamatan Cipayung**

Seperti Kecamatan Bojongsari, tidak ada sektor usaha di Kecamatan Cipayung yang andilnya cukup besar kepada PDRB Kota Depok. Andil paling besar Kecamatan Cipayung dalam hal ini terdapat pada sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan, dan itu pun hanya sebesar 7,65%. Andil Kecamatan Cipayung pada PDRB di sektor lapangan usaha lainnya berkisar antar 0,51% dan 6,89%.

Untuk pembentukan PDRB Kecamatan, sektor usaha yang paling kontribusinya paling besar di Kecamatan Cipayung adalah sektor lapangan usaha

Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor (35,08%) dan Industri Pengolahan (21,01%). Kegiatan sektor ekonomi di Kecamatan Cipayung tampaknya mirip dengan keadaan Kecamatan Bojongsari, yang mana letaknya berbatasan dengan Kabupaten Bogor.

### **3.6. Kecamatan Sukmajaya**

Dua sektor di Kecamatan Sukmajaya yang paling tinggi kontribusinya kepada PDRB menurut lapangan usaha di Kota Depok pada tahun 2019 adalah sektor Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang (25,60%) dan sektor Jasa Lainnya (24,52%). Sektor lainnya yang juga cukup besar andilnya adalah Pengadaan Listrik dan Gas (13,30%) dan Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib (13,64%).

Pada pembentukan kecamatan di Kecamatan Sukmajaya, dua sektor usaha paling menonjol andilnya pada PDRB adalah Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor (31,81%) dan Industri Pengolahan (19,98%). Sektor Jasa Lainnya juga cukup menonjol dengan andil sebesar 12,88% kepada PDRB kecamatan. Andil sektor lainnya berkisar antara 0,24% dan 8,03%.

Mencermati sektor-sektor yang tinggi andilnya kepada PDRB Kota Depok, Kecamatan Sukmajaya tampaknya berlaku sebagai kecamatan yang kegiatan-kegiatannya adalah berlaku untuk menyokong kegiatan ekonomi umumnya di Kota Depok. Berdasarkan sektor yang menonjol di Kecamatan Sukmajaya, menampakkan karakter sebagai kecamatan perkotaan.

### **3.7. Kecamatan Cilodong**

Kategori sektor usaha di Kecamatan Cilodong yang paling besar kontribusinya pada PDRB Kota Depok terdapat pada sektor Industri Pengolahan, yaitu sebesar 39,64% dari total kontribusi sektor ini. Dua sektor lainnya juga cukup besar andilnya, yaitu Konstruksi (13,75%), dan Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor (12,86%). Andil sektor yang lainnya berkisar antara 2,12% dan 8,84%.

Adapun di dalam Kecamatan Cilodong, sektor usaha yang paling tinggi kontribusinya terhadap PDRB Kecamatan Cilodong adalah sektor-sektor Industri

Pengolahan (61,32%), Konstruksi (15,45%), dan Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor (15,37%). Total andil ketiga sektor usaha tersebut kepada PDRB kecamatan adalah 92,14%. Kecamatan Cilodong tampaknya merupakan kecamatan dimana kegiatan industri paling besar yang disertai dengan sektor-sektor pendukungnya, yaitu konstruksi dan perdagangan. Terdapat beberapa pabrik yang berada di wilayah Kecamatan Cilodong. Terdapat pula dua pasar besar dan 8631 kios atau warung penggerak sektor perdagangan.

### **3.8. Kecamatan Cimanggis**

Kecamatan Cimanggis adalah kecamatan yang paling besar andilnya kepada PDRB Kota Depok pada banyak sektor usaha. Sembilan dari enam belas sektor usaha di kecamatan ini adalah sektor dengan andil berkisar antara 18,10% dan 50,65% untuk masing-masing sektor tersebut. Kontribusi tujuh sektor lainnya juga tidak dapat dikatakan kecil dalam hal ini, yaitu berkisar antara 5,36% dan 13,77%. Sektor usaha yang paling tinggi kontribusi kepada PDRRB kecamatan di Kecamatan Cimanggis adalah Konstruksi (41,06%) dan Industri Pengolahan (20,20%). Saat ini terdapat 2 pusat perbelanjaan besar, 2 pasar umum, dan 3.545 toko atau kios. Sementara untuk perindustrian, terdapat 42 industri besar sedang. Terdapat pula beberapa hotel ataupun wisma pendukung sektor wisata di Kecamatan Cimanggis.

### **3.9. Kecamatan Tapos**

Sektor usaha di Kecamatan Tapos yang paling tinggi andilnya kepada PDRB Kota Depok terdapat pada sektor Industri Pengolahan dengan andilnya sebesar 21,00%. Enam sektor lainnya memberikan andil antara 10,05% dan 13,45%, yaitu sektor-sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan, Pengadaan Listrik dan Gas, Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor, Transportasi dan Pergudangan, Penyediaan Akomodasi, dan Real Estat. Sembilan sektor lainnya memberikan andil antara 2,27% dan 9,12%.

Sektor usaha yang paling tinggi kontribusi kepada PDRRB kecamatan di Kecamatan Tapos adalah Industri Pengolahan (54,67%) dan Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor (20,79%). Besarnya andil industri

pengolahan ditopang oleh beberapa pabrik yang berada di wilayah Kecamatan Tapos. Adapun pada sektor perdagangan didukung oleh adanya pasar umum dan 3.183 toko atau kios. Kelurahan Cilangkap, Cimpaeun, dan Tapos menjadi wilayah produksi padi yang menopang sektor pertanian di Kecamatan Tapos.

### **3.10. Kecamatan Beji**

Sektor Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib adalah sektor yang Kecamatan Beji adalah yang paling tinggi andilnya kepada PDRB Kota Depok, yaitu sebesar 65,30%. Sektor lainnya yang menonjol andilnya dalam hal ini adalah Jasa Perusahaan (25,16%), Jasa Keuangan dan Asuransi (22,50%), dan Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum (17,68%). Sektor Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor (14,59%) dan sektor Pengadaan Listrik dan Gas (10,52%) merupakan dua sektor di kecamatan Beji yang andilnya kepada PDRB Kota Depok cukup besar.

Sektor-sektor Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor (32,02%) dan Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib (17,51%) merupakan sektor yang paling besar andilnya kepada PDRB kecamatan di Kecamatan Beji ini. Kecamatan Beji adalah kecamatan dimana kantor-kantor pelayanan pemerintahan berpusat. Potensi dan peluang pusat kegiatan usaha bisnis terpusat di Kecamatan Beji, Jl. Margonda Raya. Pembangunan dua jalan tol yang melintas di Kecamatan Beji sudah dilakukan sejak tahun 2014, dengan pembangunan jalan tol tsb. diperkirakan akan menjadi faktor pembangkit bagi pertumbuhan kawasan Kecamatan Beji, baik pertumbuhan penduduk maupun perekonomiannya. Contohnya sudah ditandai bertambahnya apartemen dan hotel di Kawasan Kecamatan Beji. Terdapat pula beberapa mall dan dua stasiun yang berada di Kecamatan Beji.

### **3.11. Kecamatan Limo**

Andil Kecamatan Limo kepada PDRB Kota Depok tidak ada yang lebih dari 10%. Andil tertinggi ada pada sektor Jasa Keuangan dan Asuransi dan sektor Real Estat, masing-masing sebesar 8,35% dan 8,38%. Sektor lain dengan andil lebih dari lima persen adalah Jasa Lainnya (6,80%), Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan

(6,43%), dan Pengadaan Listrik dan Gas (5,44%). Sektor lainnya memberikan andil antara 0,76% dan 4,06%. Sektor usaha yang menonjol andilnya kepada PDRB kecamatan di Kecamatan Limo ini adalah sektor Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor (27,90%) dan Industri Pengolahan (18,25%).

### **3.12. Kecamatan Cinere**

Sebagaimana Kecamatan Limo, (dan Kecamatan Bojongsari dan Kecamatan Cipayung), tidak ada sektor di Kecamatan Cinere yang andilnya cukup besar kepada PDRB Kota Depok. Sektor dengan andil paling besar ada pada sektor Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial, yaitu sebesar 9,55%. Lima sektor lainnya memberikan andil lebih dari lima persen, yaitu Jasa Pendidikan (6,75%), Pengadaan Listrik dan Gas (6,71%), Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum (6,58%), Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor (6,43%), dan Jasa Lainnya (5,72%). Sebelas sektor lainnya memiliki andil antara 0,63% sampai dengan 5,37%.

Sektor usaha yang besar andilnya kepada PDRB Kecamatan untuk Kecamatan Cinere adalah Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor (35,99%), dan Konstruksi (18,86%). Sektor Industri Pengolahan juga cukup menonjol dalam hal ini dengan andil sebesar 12,15%. Sektor perdagangan yang cukup memiliki andil tersebut adalah karena terdapat sebuah mall, Pasar Segar Cinere, dan beberapa ruko pendukung perekonomian.

## BAB IV

### PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO LAPANGAN USAHA KOTA DEPOK DIRINCI MENURUT KECAMATAN TAHUN 2019

Tabel 4.1. Produk Domestik Regional Bruto Lapangan Usaha Kota Depok Atas Dasar Harga Berlaku Dirinci Menurut Kecamatan Tahun 2019 (Milyar Rp)

No	Lapangan Usaha	Kecamatan Sawangan	Kecamatan Bojongsari	Kecamatan Pancaran Mas	Kecamatan Cipayung
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]
A	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	171,27	141,42	121,53	72,80
B	Pertambangan dan Penggalian	-	-	-	-
C	Industri Pengolahan	519,28	576,97	501,41	423,41
D	Pengadaan Listrik dan Gas	13,26	11,69	23,42	13,71
E	Pengadaan Air	1,20	1,39	22,05	0,71
F	Konstruksi	1.661,05	281,10	424,93	287,72
G	Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi dan Perawatan Mobil dan Sepeda Motor	812,12	992,51	2.032,71	706,83
H	Transportasi dan Pergudangan	91,95	110,21	145,65	98,69
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	136,45	127,03	323,47	132,65
J	Informasi dan Komunikasi	27,15	20,92	507,04	40,82
K	Jasa Keuangan	29,18	53,45	339,30	14,51
L	Real Estat	217,69	45,01	170,02	37,39
M,N	Jasa Perusahaan	5,72	2,82	21,44	2,19
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	24,67	23,17	45,90	30,71
P	Jasa Pendidikan	86,44	82,00	296,84	87,75
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	119,54	4,32	133,02	8,32
R,S,T,U	Jasa Lainnya	90,98	66,00	750,48	56,63
<b>PDRB (Miliar Rp)</b>		<b>4.007,94</b>	<b>2.539,99</b>	<b>5.859,20</b>	<b>2.014,84</b>

Tabel 4.1. (Lanjutan)

No	Lapangan Usaha	Kecamatan Sukmajaya	Kecamatan Cilodong	Kecamatan Cimanggis	Kecamatan Tapos
[1]	[2]	[7]	[8]	[9]	[10]
A	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	73,14	49,25	51,07	128,29
B	Pertambangan dan Penggalian	-	-	-	-
C	Industri Pengolahan	1.020,63	8.077,25	3.687,66	4.280,11
D	Pengadaan Listrik dan Gas	26,44	15,07	27,37	22,79
E	Pengadaan Air	13,86	2,61	6,89	1,23
F	Konstruksi	410,13	2.035,55	7.496,59	428,78
G	Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi dan Perawatan Mobil dan Sepeda Motor	1.624,99	2.024,30	1.973,53	1.627,88
H	Transportasi dan Pergudangan	222,59	268,75	1.361,59	370,91
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	297,92	218,99	528,72	330,02
J	Informasi dan Komunikasi	67,13	40,18	357,54	56,94
K	Jasa Keuangan	100,79	140,45	1.105,13	75,22
L	Real Estat	129,05	34,13	101,92	115,60
M,N	Jasa Perusahaan	12,06	7,66	31,50	13,15
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	262,09	40,65	123,61	86,30
P	Jasa Pendidikan	145,99	77,15	886,32	117,61
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	43,05	19,96	325,65	21,00
R,S,T,U	Jasa Lainnya	658,14	120,48	194,70	153,13
<b>PDRB (Miliar Rp)</b>		<b>5.108,02</b>	<b>13.172,44</b>	<b>18.259,78</b>	<b>7.828,95</b>

Tabel 4.1. (Lanjutan)

No	Lapangan Usaha	Kecamatan Beji	Kecamatan Limo	Kecamatan Cinere	Kota DEPOK
[1]	[2]	[11]	[12]	[13]	[14]
A	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	58,17	61,22	24,09	952,27
B	Pertambangan dan Penggalian	-	-	-	-
C	Industri Pengolahan	535,08	414,35	341,56	20.377,71
D	Pengadaan Listrik dan Gas	20,91	10,81	13,33	198,80
E	Pengadaan Air	1,15	0,91	2,15	54,13
F	Konstruksi	951,64	293,03	530,25	14.800,78
G	Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi dan Perawatan Mobil dan Sepeda Motor	2.295,50	633,46	1.012,03	15.735,86
H	Transportasi dan Pergudangan	175,77	97,26	95,91	3.039,28
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	513,96	106,19	191,27	2.906,66
J	Informasi dan Komunikasi	76,44	27,92	49,74	1.271,82
K	Jasa Keuangan	635,90	235,90	96,05	2.825,89
L	Real Estat	141,33	96,35	61,80	1.150,29
M,N	Jasa Perusahaan	36,26	5,86	5,47	144,12
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	1.254,87	17,63	12,08	1.921,69
P	Jasa Pendidikan	186,18	80,69	148,24	2.195,20
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	27,77	5,98	74,80	783,40
R,S,T,U	Jasa Lainnya	257,57	182,59	153,40	2.684,09
<b>PDRB (Miliar Rp)</b>		<b>7.168,50</b>	<b>2.270,14</b>	<b>2.812,18</b>	<b>71.041,99</b>

Tabel 4.2. Produk Domestik Regional Bruto Lapangan Usaha Kota Depok Atas Dasar Harga Konstan 2010 Dirinci Menurut Kecamatan Tahun 2019 (Miliar Rp)

No	Lapangan Usaha	Kecamatan Sawangan	Kecamatan Bojongsari	Kecamatan Pancaran Mas	Kecamatan Cipayung
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]
A	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	97,50	79,00	69,79	42,14
B	Pertambangan dan Penggalian	-	-	-	-
C	Industri Pengolahan	360,01	401,99	349,17	296,38
D	Pengadaan Listrik dan Gas	8,59	7,58	15,18	8,88
E	Pengadaan Air	0,80	0,92	14,67	0,47
F	Konstruksi	1.188,63	201,15	304,07	205,89
G	Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi dan Perawatan Mobil dan Sepeda Motor	554,36	677,62	1.376,66	483,06
H	Transportasi dan Pergudangan	51,52	62,30	82,43	55,41
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	80,23	74,68	190,22	78,00
J	Informasi dan Komunikasi	28,35	21,83	529,31	42,61
K	Jasa Keuangan	19,19	33,95	221,61	9,59
L	Real Estat	166,05	34,33	129,69	28,52
M,N	Jasa Perusahaan	4,17	2,05	15,64	1,60
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	15,18	14,25	28,23	18,89
P	Jasa Pendidikan	54,77	51,95	188,07	55,59
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	86,14	3,11	95,85	5,99
R,S,T,U	Jasa Lainnya	69,79	50,63	575,71	43,44
<b>PDRB (Miliar Rp)</b>		<b>2.785,26</b>	<b>1.717,36</b>	<b>4.186,30</b>	<b>1.376,49</b>

Tabel 4.2. (Lanjutan)

No	Lapangan Usaha	Kecamatan Sukmajaya	Kecamatan Cilodong	Kecamatan Cimanggis	Kecamatan Tapos
[1]	[2]	[7]	[8]	[9]	[10]
A	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	42,25	27,89	28,92	73,04
B	Pertambangan dan Penggalian	-	-	-	-
C	Industri Pengolahan	719,99	5.593,51	2.620,18	3.056,75
D	Pengadaan Listrik dan Gas	17,14	9,77	17,74	14,77
E	Pengadaan Air	9,22	1,74	4,58	0,82
F	Konstruksi	293,49	1.456,61	5.364,45	306,83
G	Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi dan Perawatan Mobil dan Sepeda Motor	1.108,73	1.354,82	1.342,63	1.113,95
H	Transportasi dan Pergudangan	125,70	151,27	763,23	208,03
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	176,08	128,81	311,22	194,20
J	Informasi dan Komunikasi	70,08	41,95	373,25	59,44
K	Jasa Keuangan	65,96	88,05	739,28	48,06
L	Real Estat	98,44	26,04	77,75	88,18
M,N	Jasa Perusahaan	8,79	5,58	22,97	9,59
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	161,22	25,00	76,04	53,09
P	Jasa Pendidikan	92,50	48,88	561,55	74,51
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	31,02	14,38	234,65	15,13
R,S,T,U	Jasa Lainnya	504,87	92,42	149,36	117,47
<b>PDRB (Miliar Rp)</b>		<b>3.525,47</b>	<b>9.066,73</b>	<b>12.687,78</b>	<b>5.433,85</b>

Tabel 4.2. (Lanjutan)

No	Lapangan Usaha	Kecamatan Beji	Kecamatan Limo	Kecamatan Cinere	Kota DEPOK
[1]	[2]	[11]	[12]	[13]	[14]
A	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	33,52	35,25	13,76	543,05
B	Pertambangan dan Penggalian	-	-	-	-
C	Industri Pengolahan	372,91	285,53	237,02	14.293,45
D	Pengadaan Listrik dan Gas	13,55	7,00	8,64	128,84
E	Pengadaan Air	0,76	0,60	1,43	36,02
F	Konstruksi	680,98	209,69	379,44	10.591,23
G	Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi dan Perawatan Mobil dan Sepeda Motor	1.556,42	432,33	684,40	10.684,99
H	Transportasi dan Pergudangan	100,43	55,00	53,81	1.709,13
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	306,09	62,45	112,54	1.714,51
J	Informasi dan Komunikasi	79,80	29,14	51,93	1.327,69
K	Jasa Keuangan	422,63	156,53	63,91	1.868,75
L	Real Estat	107,80	73,49	47,14	877,44
M,N	Jasa Perusahaan	26,44	4,27	3,99	105,09
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	771,92	10,85	7,43	1.182,11
P	Jasa Pendidikan	117,96	51,12	93,92	1.390,82
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	20,01	4,31	53,90	564,49
R,S,T,U	Jasa Lainnya	197,59	140,07	117,68	2.059,01
<b>PDRB (Miliar Rp)</b>		<b>4.808,81</b>	<b>1.557,64</b>	<b>1.930,93</b>	<b>49.076,63</b>

Tabel 4.3. Distribusi Produk Domestik Regional Bruto Lapangan Usaha Kota Depok Atas Dasar Harga Berlaku Dirinci Menurut Kecamatan Tahun 2019 (Persen)

No	Lapangan Usaha	Kecamatan Sawangan	Kecamatan Bojongsari	Kecamatan Pancaran Mas	Kecamatan Cipayung
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]
A	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	4,27	5,46	2,09	3,66
B	Pertambangan dan Penggalian	-	-	-	-
C	Industri Pengolahan	12,82	22,59	8,51	20,93
D	Pengadaan Listrik dan Gas	0,33	0,46	0,40	0,68
E	Pengadaan Air	0,03	0,05	0,38	0,04
F	Konstruksi	41,47	11,08	7,27	14,25
G	Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi dan Perawatan Mobil dan Sepeda Motor	20,38	39,34	34,68	35,23
H	Transportasi dan Pergudangan	2,29	4,37	2,51	4,88
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	3,40	4,99	5,52	6,55
J	Informasi dan Komunikasi	0,68	0,82	8,67	2,02
K	Jasa Keuangan	0,72	2,02	5,73	0,72
L	Real Estat	5,44	1,77	2,91	1,85
M,N	Jasa Perusahaan	0,14	0,11	0,37	0,11
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	0,62	0,91	0,78	1,52
P	Jasa Pendidikan	2,16	3,23	5,08	4,35
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	2,98	0,17	2,27	0,41
R,S,T,U	Jasa Lainnya	2,27	2,60	12,84	2,80
<b>Total</b>		<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>

Tabel 4.3. (Lanjutan)

No	Lapangan Usaha	Kecamatan Sukmajaya	Kecamatan Cilodong	Kecamatan Cimanggis	Kecamatan Tapos
[1]	[2]	[7]	[8]	[9]	[10]
A	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	1,45	0,38	0,28	1,62
B	Pertambangan dan Penggalian	-	-	-	-
C	Industri Pengolahan	20,04	61,19	20,39	55,06
D	Pengadaan Listrik dan Gas	0,52	0,12	0,15	0,29
E	Pengadaan Air	0,27	0,02	0,04	0,02
F	Konstruksi	8,01	15,62	40,92	5,42
G	Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi dan Perawatan Mobil dan Sepeda Motor	31,87	15,31	10,79	20,73
H	Transportasi dan Pergudangan	4,36	2,06	7,41	4,67
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	5,83	1,68	2,88	4,16
J	Informasi dan Komunikasi	1,31	0,31	1,95	0,72
K	Jasa Keuangan	1,95	1,02	6,10	0,92
L	Real Estat	2,52	0,26	0,56	1,46
M,N	Jasa Perusahaan	0,24	0,06	0,17	0,17
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	5,12	0,31	0,67	1,09
P	Jasa Pendidikan	2,85	0,59	4,84	1,49
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	0,84	0,15	1,78	0,27
R,S,T,U	Jasa Lainnya	12,85	0,92	1,06	1,93
<b>Total</b>		<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>

Tabel 4.3. (Lanjutan)

No	Lapangan Usaha	Kecamatan Beji	Kecamatan Limo	Kecamatan Cinere	Kota DEPOK
[1]	[2]	[11]	[12]	[13]	[14]
A	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	0,82	2,73	0,86	1,34
B	Pertambangan dan Penggalian	-	-	-	-
C	Industri Pengolahan	7,41	17,95	12,05	28,68
D	Pengadaan Listrik dan Gas	0,29	0,48	0,48	0,28
E	Pengadaan Air	0,02	0,04	0,08	0,08
F	Konstruksi	13,27	12,92	18,91	20,83
G	Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi dan Perawatan Mobil dan Sepeda Motor	31,95	28,08	35,94	22,15
H	Transportasi dan Pergudangan	2,49	4,31	3,41	4,28
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	7,23	4,67	6,80	4,09
J	Informasi dan Komunikasi	1,07	1,23	1,77	1,79
K	Jasa Keuangan	8,91	10,44	3,45	3,98
L	Real Estat	1,97	4,25	2,20	1,62
M,N	Jasa Perusahaan	0,51	0,26	0,20	0,20
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	17,49	0,78	0,43	2,71
P	Jasa Pendidikan	2,60	3,56	5,29	3,09
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	0,39	0,26	2,67	1,10
R,S,T,U	Jasa Lainnya	3,59	8,05	5,47	3,78
<b>Total</b>		<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>

Tabel 4.4. Distribusi Produk Domestik Regional Bruto Lapangan Usaha Kota Depok Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2010 Dirinci Menurut Kecamatan Tahun 2019 (Persen)

No	Lapangan Usaha	Kecamatan Sawangan	Kecamatan Bojongsari	Kecamatan Pancaran Mas	Kecamatan Cipayung
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]
A	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	3,50	4,60	1,67	3,06
B	Pertambangan dan Penggalian	-	-	-	-
C	Industri Pengolahan	12,93	23,41	8,34	21,53
D	Pengadaan Listrik dan Gas	0,31	0,44	0,36	0,65
E	Pengadaan Air	0,03	0,05	0,35	0,03
F	Konstruksi	42,68	11,71	7,26	14,96
G	Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi dan Perawatan Mobil dan Sepeda Motor	19,90	39,46	32,88	35,09
H	Transportasi dan Pergudangan	1,85	3,63	1,97	4,03
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	2,88	4,35	4,54	5,67
J	Informasi dan Komunikasi	1,02	1,27	12,64	3,10
K	Jasa Keuangan	0,69	1,98	5,29	0,70
L	Real Estat	5,96	2,00	3,10	2,07
M,N	Jasa Perusahaan	0,15	0,12	0,37	0,12
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	0,54	0,83	0,67	1,37
P	Jasa Pendidikan	1,97	3,03	4,49	4,04
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	3,09	0,18	2,29	0,44
R,S,T,U	Jasa Lainnya	2,51	2,95	13,75	3,16
<b>Total</b>		<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>

Tabel 4.4. (Lanjutan)

No	Lapangan Usaha	Kecamatan Sukmajaya	Kecamatan Cilodong	Kecamatan Cimanggis	Kecamatan Tapos
[1]	[2]	[7]	[8]	[9]	[10]
A	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	1,20	0,31	0,23	1,34
B	Pertambangan dan Penggalian	-	-	-	-
C	Industri Pengolahan	20,42	61,69	20,65	56,25
D	Pengadaan Listrik dan Gas	0,49	0,11	0,14	0,27
E	Pengadaan Air	0,26	0,02	0,04	0,02
F	Konstruksi	8,32	16,07	42,28	5,65
G	Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi dan Perawatan Mobil dan Sepeda Motor	31,45	14,94	10,58	20,50
H	Transportasi dan Pergudangan	3,57	1,67	6,02	3,83
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	4,99	1,42	2,45	3,57
J	Informasi dan Komunikasi	1,99	0,46	2,94	1,09
K	Jasa Keuangan	1,87	0,97	5,83	0,88
L	Real Estat	2,79	0,29	0,61	1,62
M,N	Jasa Perusahaan	0,25	0,06	0,18	0,18
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	4,57	0,28	0,60	0,98
P	Jasa Pendidikan	2,62	0,54	4,43	1,37
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	0,88	0,16	1,85	0,28
R,S,T,U	Jasa Lainnya	14,32	1,02	1,18	2,16
<b>Total</b>		<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>

Tabel 4.4. (Lanjutan)

No	Lapangan Usaha	Kecamatan Beji	Kecamatan Limo	Kecamatan Cinere	Kota DEPOK
[1]	[2]	[11]	[12]	[13]	[14]
A	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	0,70	2,26	0,71	1,11
B	Pertambangan dan Penggalian	-	-	-	-
C	Industri Pengolahan	7,75	18,33	12,28	29,12
D	Pengadaan Listrik dan Gas	0,28	0,45	0,45	0,26
E	Pengadaan Air	0,02	0,04	0,07	0,07
F	Konstruksi	14,16	13,46	19,65	21,58
G	Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi dan Perawatan Mobil dan Sepeda Motor	32,37	27,76	35,44	21,77
H	Transportasi dan Pergudangan	2,09	3,53	2,79	3,48
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	6,37	4,01	5,83	3,49
J	Informasi dan Komunikasi	1,66	1,87	2,69	2,71
K	Jasa Keuangan	8,79	10,05	3,31	3,81
L	Real Estat	2,24	4,72	2,44	1,79
M,N	Jasa Perusahaan	0,55	0,27	0,21	0,21
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	16,05	0,70	0,38	2,41
P	Jasa Pendidikan	2,45	3,28	4,86	2,83
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	0,42	0,28	2,79	1,15
R,S,T,U	Jasa Lainnya	4,11	8,99	6,09	4,20
<b>Total</b>		<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>

Tabel 4.5. *Sharing* Setiap Sub Sektor Ekonomi di Kecamatan dalam Pembentukan Produk Domestik Regional Bruto Lapangan Usaha Kota Depok Atas Dasar Harga Berlaku Tahun 2019 (Persen)

No	Lapangan Usaha	Kecamatan Sawangan	Kecamatan Bojongsari	Kecamatan Pancaran Mas	Kecamatan Cipayung
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]
A	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	17,99	14,85	12,76	7,65
B	Pertambangan dan Penggalian	-	-	-	-
C	Industri Pengolahan	2,55	2,83	2,46	2,08
D	Pengadaan Listrik dan Gas	6,67	5,88	11,78	6,89
E	Pengadaan Air	2,22	2,57	40,73	1,31
F	Konstruksi	11,22	1,90	2,87	1,94
G	Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi dan Perawatan Mobil dan Sepeda Motor	5,16	6,31	12,92	4,49
H	Transportasi dan Pergudangan	3,03	3,63	4,79	3,25
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	4,69	4,37	11,13	4,56
J	Informasi dan Komunikasi	2,13	1,64	39,87	3,21
K	Jasa Keuangan	1,03	1,89	12,01	0,51
L	Real Estat	18,92	3,91	14,78	3,25
M,N	Jasa Perusahaan	3,97	1,95	14,88	1,52
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	1,28	1,21	2,39	1,60
P	Jasa Pendidikan	3,94	3,74	13,52	4,00
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	15,26	0,55	16,98	1,06
R,S,T,U	Jasa Lainnya	3,39	2,46	27,96	2,11
<b>PDRB</b>		<b>5,64</b>	<b>3,58</b>	<b>8,25</b>	<b>2,84</b>

Tabel 4.5. (Lanjutan)

No	Lapangan Usaha	Kecamatan Sukmajaya	Kecamatan Cilodong	Kecamatan Cimanggis	Kecamatan Tapos
[1]	[2]	[7]	[8]	[9]	[10]
A	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	7,68	5,17	5,36	13,47
B	Pertambangan dan Penggalian	-	-	-	-
C	Industri Pengolahan	5,01	39,64	18,10	21,00
D	Pengadaan Listrik dan Gas	13,30	7,58	13,77	11,47
E	Pengadaan Air	25,60	4,82	12,72	2,27
F	Konstruksi	2,77	13,75	50,65	2,90
G	Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi dan Perawatan Mobil dan Sepeda Motor	10,33	12,86	12,54	10,35
H	Transportasi dan Pergudangan	7,32	8,84	44,80	12,20
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	10,25	7,53	18,19	11,35
J	Informasi dan Komunikasi	5,28	3,16	28,11	4,48
K	Jasa Keuangan	3,57	4,97	39,11	2,66
L	Real Estat	11,22	2,97	8,86	10,05
M,N	Jasa Perusahaan	8,37	5,31	21,86	9,12
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	13,64	2,12	6,43	4,49
P	Jasa Pendidikan	6,65	3,51	40,38	5,36
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	5,50	2,55	41,57	2,68
R,S,T,U	Jasa Lainnya	24,52	4,49	7,25	5,70
<b>PDRB</b>		<b>7,19</b>	<b>18,54</b>	<b>25,70</b>	<b>11,02</b>

Tabel 4.5. (Lanjutan)

No	Lapangan Usaha	Kecamatan Beji	Kecamatan Limo	Kecamatan Cinere	Kota Depok
[1]	[2]	[11]	[12]	[13]	[14]
A	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	6,11	6,43	2,53	100,00
B	Pertambangan dan Penggalian	-	-	-	-
C	Industri Pengolahan	2,63	2,03	1,68	100,00
D	Pengadaan Listrik dan Gas	10,52	5,44	6,71	100,00
E	Pengadaan Air	2,12	1,68	3,98	100,00
F	Konstruksi	6,43	1,98	3,58	100,00
G	Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi dan Perawatan Mobil dan Sepeda Motor	14,59	4,03	6,43	100,00
H	Transportasi dan Pergudangan	5,78	3,20	3,16	100,00
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	17,68	3,65	6,58	100,00
J	Informasi dan Komunikasi	6,01	2,20	3,91	100,00
K	Jasa Keuangan	22,50	8,35	3,40	100,00
L	Real Estat	12,29	8,38	5,37	100,00
M,N	Jasa Perusahaan	25,16	4,06	3,80	100,00
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	65,30	0,92	0,63	100,00
P	Jasa Pendidikan	8,48	3,68	6,75	100,00
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	3,54	0,76	9,55	100,00
R,S,T,U	Jasa Lainnya	9,60	6,80	5,72	100,00
<b>PDRB</b>		<b>10,09</b>	<b>3,20</b>	<b>3,96</b>	<b>100,00</b>

Tabel 4.6. *Sharing* Setiap Sub Sektor Ekonomi di Kecamatan dalam Pembentukan Produk Domestik Regional Bruto Lapangan Usaha Kota Depok Atas Dasar Harga Konstan 2010 Tahun 2019 (Persen)

No	Lapangan Usaha	Kecamatan Sawangan	Kecamatan Bojongsari	Kecamatan Pancaran Mas	Kecamatan Cipayung
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]
A	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	17,95	14,55	12,85	7,76
B	Pertambangan dan Penggalian	-	-	-	-
C	Industri Pengolahan	2,52	2,81	2,44	2,07
D	Pengadaan Listrik dan Gas	6,67	5,88	11,78	6,89
E	Pengadaan Air	2,22	2,57	40,73	1,31
F	Konstruksi	11,22	1,90	2,87	1,94
G	Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi dan Perawatan Mobil dan Sepeda Motor	5,19	6,34	12,88	4,52
H	Transportasi dan Pergudangan	3,01	3,65	4,82	3,24
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	4,68	4,36	11,09	4,55
J	Informasi dan Komunikasi	2,13	1,64	39,87	3,21
K	Jasa Keuangan	1,03	1,82	11,86	0,51
L	Real Estat	18,92	3,91	14,78	3,25
M,N	Jasa Perusahaan	3,97	1,95	14,88	1,52
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	1,28	1,21	2,39	1,60
P	Jasa Pendidikan	3,94	3,74	13,52	4,00
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	15,26	0,55	16,98	1,06
R,S,T,U	Jasa Lainnya	3,39	2,46	27,96	2,11
<b>PDRB</b>		<b>5,64</b>	<b>3,57</b>	<b>8,23</b>	<b>2,84</b>

Tabel 4.6. (Lanjutan)

No	Lapangan Usaha	Kecamatan Sukmajaya	Kecamatan Cilodong	Kecamatan Cimanggis	Kecamatan Tapos
[1]	[2]	[7]	[8]	[9]	[10]
A	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	7,78	5,14	5,33	13,45
B	Pertambangan dan Penggalian	-	-	-	-
C	Industri Pengolahan	5,04	39,13	18,33	21,39
D	Pengadaan Listrik dan Gas	13,30	7,58	13,77	11,47
E	Pengadaan Air	25,60	4,82	12,72	2,27
F	Konstruksi	2,77	13,75	50,65	2,90
G	Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi dan Perawatan Mobil dan Sepeda Motor	10,38	12,68	12,57	10,43
H	Transportasi dan Pergudangan	7,35	8,85	44,66	12,17
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	10,27	7,51	18,15	11,33
J	Informasi dan Komunikasi	5,28	3,16	28,11	4,48
K	Jasa Keuangan	3,53	4,71	39,56	2,57
L	Real Estat	11,22	2,97	8,86	10,05
M,N	Jasa Perusahaan	8,37	5,31	21,86	9,12
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	13,64	2,12	6,43	4,49
P	Jasa Pendidikan	6,65	3,51	40,38	5,36
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	5,50	2,55	41,57	2,68
R,S,T,U	Jasa Lainnya	24,52	4,49	7,25	5,70
<b>PDRB</b>		<b>7,21</b>	<b>18,34</b>	<b>25,79</b>	<b>11,14</b>

Tabel 4.6. (Lanjutan)

No	Lapangan Usaha	Kecamatan Beji	Kecamatan Limo	Kecamatan Cinere	Kota DEPOK
[1]	[2]	[11]	[12]	[13]	[14]
A	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	6,17	6,49	2,53	100,00
B	Pertambangan dan Penggalian	-	-	-	-
C	Industri Pengolahan	2,61	2,00	1,66	100,00
D	Pengadaan Listrik dan Gas	10,52	5,44	6,71	100,00
E	Pengadaan Air	2,12	1,68	3,98	100,00
F	Konstruksi	6,43	1,98	3,58	100,00
G	Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi dan Perawatan Mobil dan Sepeda Motor	14,57	4,05	6,41	100,00
H	Transportasi dan Pergudangan	5,88	3,22	3,15	100,00
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	17,85	3,64	6,56	100,00
J	Informasi dan Komunikasi	6,01	2,20	3,91	100,00
K	Jasa Keuangan	22,62	8,38	3,42	100,00
L	Real Estat	12,29	8,38	5,37	100,00
M,N	Jasa Perusahaan	25,16	4,06	3,80	100,00
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	65,30	0,92	0,63	100,00
P	Jasa Pendidikan	8,48	3,68	6,75	100,00
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	3,54	0,76	9,55	100,00
R,S,T,U	Jasa Lainnya	9,60	6,80	5,72	100,00
<b>PDRB</b>		<b>10,10</b>	<b>3,19</b>	<b>3,95</b>	<b>100,00</b>



**Dinas Komunikasi dan Informatika  
Pemerintah Kota Depok**

**Gedung Dibaleka II Komplek Balaikota  
Depok Lantai 7 Jl. Margonda Raya No. 54  
Depok**

**Telp. (021) 29402276 dan (021) 7764410**

**Email: [diskominfo@depok.go.id](mailto:diskominfo@depok.go.id)**